

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PORTOFOLIO

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd



Disusun Oleh Kelompok 2:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Clara Kelviana Kerin | 2313031064 |
| 2. Wina Nadia Maratama | 2313031070 |
| 3. Kadek Anan Ferdiana | 2313031075 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

A. ARTIKEL

Artikel I

Judul:

A Thematic Literature Review on International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Penulis :

Sean Scanell & Vincent Tawiah

Tahun terbit:

29 Mei 2024

Alamat : <https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-024-00773-1>

Deskripsi

Definisi

Artikel ini adalah *tinjauan tematik* (thematic literature review) yang mensintesis literatur akademik tentang International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) untuk periode sekitar 2000–2023. Inti kajiannya adalah mengidentifikasi tema besar penelitian IPSAS (mis. adopsi, konsekuensi, tantangan implementasi, perbedaan antara negara maju dan berkembang) dan menilai sejauh mana literatur memberikan bukti empiris tentang manfaat IPSAS.

Tujuan artikel

1. Mengumpulkan dan mengorganisir literatur IPSAS untuk melihat pola penelitian dan celah (research gaps).
2. Mengkategorikan temuan utama (drivers of adoption, consequences, hambatan implementasi, perbedaan cash-basis vs accrual).
3. Memberi agenda penelitian masa depan yang terarah untuk studi IPSAS.

Sifat artikel

- Jenis: Tinjauan sistematis/tematik literatur (*review paper*).
- Sifat ilmiah: akademik, *open-access* di jurnal bereputasi; berbasis analisis literatur dari database bereputasi (*Web of Science, Scopus dll.*).

Karakteristik artikel (metodologi & temuan utama)

- Metodologi: Pengumpulan literatur multi-database, klasifikasi tematik, pembobotan dan analisis tren (tahun, wilayah, topik).
- Temuan utama: (a) Adopsi IPSAS menunjukkan manfaat potensial di negara maju namun tantangan implementasi nyata di negara berkembang; (b) ada isu pendidikan, kapasitas sumber daya manusia, dan ketidaksesuaian konteks lokal yang menghambat manfaat penuh; (c) bukti bahwa accrual accounting selalu dipakai dalam pengambilan keputusan publik masih terbatas.

Ruang lingkup

Fokus global, membandingkan studi di Eropa, Afrika, Asia, dan negara berkembang vs maju; periode kajian literatur 2000–2023; menelaah artikel akademik (paper jurnal, artikel konferensi) yang membahas IPSAS. Tidak melakukan studi lapangan primer melainkan sintesis literatur.

Artikel II

Judul:

Accrual Accounting in the Public Sector: A Systematic Thematic Review

Penulis:

Agustinus

Tahun terbit:

24 Juli 2025

Alamat:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5353622

Deskripsi**Definisi**

Artikel ini menyajikan *systematic thematic review* mengenai akuntansi basis akrual di sektor publik — menganalisis bukti empiris dan konseptual tentang manfaat, hambatan, serta dampak akuntansi akrual pada transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan pemerintah. Review menyusun temuan ke dalam beberapa tema inti yang menggambarkan pengalaman internasional implementasi akrual.

Tujuan artikel

- Menyintesis literatur global terkait akuntansi akrual di sektor publik.
- Mengelompokkan isu menjadi tema: (1) konteks institusional & implementasi; (2) tantangan teknis & sumber daya; (3) pengukuran, pelaporan & kegunaan informasi; (4) risiko, integritas, dan ketahanan sistem.
- Memberikan rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian.

Sifat artikel

- Jenis: Review sistematis tematik (paper akademik di SSRN).
- Sifat: Analitis dan sintetis — bukan studi empiris primer; meninjau bukti dari berbagai negara dan jenis publikasi.

Karakteristik artikel (metodologi & temuan utama)

- Metodologi: Sistematis mengumpulkan studi relevan lalu mengorganisir hasilnya dalam empat tema besar (lihat tujuan).

- Temuan utama: Adopsi akrual terpengaruh oleh regulasi, tradisi administrasi, politik; ada kendala pendidikan/personnel, infrastruktur TI, dan masalah rekonsiliasi antara anggaran (*budgeting*) dan akuntansi; tanpa reformasi menyeluruh, manfaat akrual (seperti keputusan berbasis informasi yang lebih baik) sukar terwujud; terdapat juga risiko manipulasi pelaporan jika governance & kontrol lemah

Ruang lingkup

Kajian bersifat lintas-negara (global), mencakup literatur hingga tahun penulisan (2025). Fokus pada implikasi kebijakan dan praktik implementasi akrual di lingkungan pemerintahan pusat dan lokal.

Artikel III

Judul:

Environmental accounting in public sector: systematic literature review

Penulis

1. Evi Rahmawati
2. Ietje Nazaruddin
3. Harjanti Widiastuti
4. Hafiez Sofyani, Arif Wahyu Nur Kholid

Tahun terbit:

16 Juli 2025

Deskripsi

Definisi

Tinjauan sistematis yang fokus pada *Environmental Accounting (EA)* atau green accounting dalam konteks sektor publik. Artikel ini memetakan tren penelitian EA publik (2010–2023 via Scopus), mengelompokkan tema penelitian, dan menilai kontribusi publik

sektor dalam pencapaian SDGs serta bagaimana EA dapat meningkatkan akuntabilitas lingkungan pemerintah.

Tujuan artikel

- Menentukan pola publikasi, topik, dan kualitas publikasi EA di sektor publik.
- Mengidentifikasi kluster tema (Green Accounting, Environmental Regulation, SDGs) dan menyorot gap penelitian serta rekomendasi untuk riset lanjutan.

Sifat artikel

- Jenis: Systematic literature review (SLR) berbasis database Scopus.
- Sifat: Akademik, dengan metodologi bibliometrik (VOSviewer digunakan untuk analisis kata kunci & kluster).

Karakteristik artikel (metodologi & temuan utama)

- Metodologi: Seleksi artikel Scopus 2010–2023 → analisis bibliometrik + kualitatif; final sample 69 artikel.
- Temuan utama: Penelitian EA di sektor publik relatif terbatas dibanding privat; tiga kluster utama topik (green accounting, regulasi lingkungan, SDGs); mayoritas riset Q1 dan jurnal tertentu (mis. Journal of Cleaner Production) menjadi publikasi utama; butuh studi empiris lebih banyak tentang bagaimana EA berpengaruh pada kualitas informasi dan pengambilan keputusan di pemerintah.

Ruang lingkup

Fokus global berdasarkan publikasi yang terindeks Scopus (2010–2023), namun dengan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pusat. Tidak membahas secara mendetail kasus negara tertentu — melainkan pola penelitian dan rekomendasi riset.

B. JURNAL NASIONAL

Jurnal I

Judul:

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Penulis

Erwinton Putra Antonius Tarigan & Lastria Nurtanzila

Tahun Terbit

2013

Nama Jurnal

Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)

Volume dan Halaman: Vol. 17 No. 1, Hal. 29–45

Deskripsi

Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi ini dilakukan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta guna melihat sejauh mana SAP akrual berdampak pada mutu pelaporan keuangan, menilai efektivitas kebijakan pengelolaan keuangannya, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, telaah dokumen resmi, serta penyebaran kuesioner

kepada 24 pegawai DPDPK. Ketiga sumber data ini kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran aktual mengenai praktik akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

Sampel/Objek

Objek penelitian adalah DPDPK Kota Yogyakarta, instansi yang berperan sebagai pengelola dan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih rinci, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Para responden juga menilai bahwa akuntansi akrual membantu pemerintah dalam memantau aset secara lebih akurat, meningkatkan keandalan data keuangan, dan memperkuat fungsi pengawasan oleh publik. Meskipun demikian, sebagian pegawai berpendapat bahwa sistem kas menuju akrual yang selama ini digunakan sebenarnya masih cukup untuk menampilkan gambaran kinerja pemerintah.

Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi daerah, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, belum adanya sistem informasi keuangan yang terpadu, serta persoalan teknis dalam pencatatan aset tetap. Selain hambatan internal, terdapat pula faktor eksternal seperti ketidaksesuaian regulasi antarinstansi, rendahnya pemahaman DPRD mengenai akuntansi pemerintahan, serta pengaruh opini BPK yang turut menentukan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan akuntansi akrual.

Tuntunan (Implikasi & Manfaat)

Penerapan SAP akrual memberikan fondasi penting bagi daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, lengkap, dan dapat dipercaya. Melalui pendekatan akrual, pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, termasuk posisi aset dan kewajiban, biaya operasional, serta capaian program. Informasi yang lebih komprehensif ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan

yang lebih tepat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, serta mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan aplikasi akuntansi yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi merupakan prasyarat utama agar penerapan SAP akrual dapat memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa SAP berbasis akrual berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh delapan aspek utama, yaitu komitmen pimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, persoalan pencatatan aset tetap, konsistensi regulasi, opini BPK, tingkat pemahaman DPRD, serta mekanisme keterbukaan informasi publik. Jika seluruh faktor tersebut diperbaiki, laporan keuangan berbasis akrual akan mampu menyajikan informasi yang lebih lengkap, andal, serta efektif untuk mendukung pengawasan publik dan pengambilan keputusan pemerintah.

Jurnal II

Judul:

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis mengenai atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Nama Penulis

Prasetyono Hendriarto, Lukman Hakim Sangapan, Atik Budi Paryanti, Adler Haymans Manurung, Amran Manurung

Tahun Terbit

2025

Nama Jurnal

Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi (JGIA)

Volume dan Halaman

Volume 3 Nomor 2, halaman 59–69

Deskripsi**Tujuan**

Penelitian ini ditujukan untuk meninjau bagaimana praktik akuntansi sektor publik diterapkan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kajian ini juga mengevaluasi sejauh mana akuntansi berbasis akrual diimplementasikan secara efektif, membandingkan kondisi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan reformasi akuntansi tersebut.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi sistematis yang dipadukan dengan analisis deskriptif dan komparatif. Data diperoleh dari beragam dokumen laporan keuangan, wawancara dengan pihak yang berwenang, dan pengamatan terhadap penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah.

Sampel

Sampel penelitian terdiri atas lima instansi pemerintah pusat dan lima belas pemerintah daerah. Pemilihan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kelengkapan laporan keuangan, capaian opini audit, serta tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual.

Hasil Penelitian

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Sebanyak 65% instansi yang diteliti berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara

konsisten. Selain itu, transparansi semakin meningkat, terutama pada pemerintah pusat yang secara rutin membuka akses publik terhadap laporan keuangannya.

Namun, implementasinya belum merata di seluruh daerah. Sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya tenaga akuntansi yang kompeten (75%), minimnya pelatihan terkait SAP berbasis akrual (60%), serta belum optimalnya integrasi sistem informasi keuangan (45%). Daerah dengan kemampuan fiskal lebih kuat umumnya menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan daerah dengan keterbatasan anggaran.

Tuntunan (Implikasi/Manfaat)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan sistem yang sudah tersedia. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan penting. Di samping itu, pengembangan dan pembaruan infrastruktur sistem informasi keuangan perlu dilakukan agar data dapat disajikan secara akurat, cepat, dan mudah diakses. Komitmen pimpinan daerah juga memegang peranan besar karena kebijakan yang mereka tetapkan akan menentukan arah budaya keterbukaan dalam organisasi. Selain itu, penguatan mekanisme audit internal diperlukan agar pengawasan keuangan berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang lebih baik memerlukan kombinasi kompetensi SDM, dukungan teknologi, sistem pengawasan yang kuat, dan kepemimpinan yang mendorong transparansi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktik akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Implementasi akuntansi akrual, semakin banyaknya instansi yang memperoleh opini WTP, serta proses digitalisasi laporan keuangan menjadi indikator kemajuan tersebut. Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat perbedaan kapasitas antara daerah, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun komitmen pimpinan.

Penelitian ini menekankan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman akuntansi bagi aparatur pemerintah, serta percepatan digitalisasi sistem keuangan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Jurnal III

Judul:

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance* dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Nama Penulis

1. Neneng Karlina
2. Trisna Sary Lewaru
3. Dwi Kriswantini

Tahun Terbit

2023

Nama Jurnal

Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

Volume dan Halaman

Volume 1, Nomor 3, Halaman 300–306

Deskripsi

Artikel ini mengkaji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pengawasan internal terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Penelitian ini disusun untuk memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana akuntansi publik, kualitas *governance*, dan mekanisme pengawasan berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah dalam konteks pelayanan masyarakat. Fokus penelitian

diarahkan pada bagaimana ketiga variabel tersebut dapat memperkuat kinerja birokrasi di wilayah yang masih menghadapi berbagai persoalan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan.

Tujuan

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara akuntansi sektor publik, implementasi good governance, serta sistem pengawasan internal dengan capaian kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Buru Selatan. Melalui pengujian empiris, penelitian ini bermaksud menilai apakah ketiga variabel tersebut mampu meningkatkan mutu, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data utama diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang bekerja pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan kriteria aparatur pemerintah yang memiliki jabatan struktural serta pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, dengan masa kerja minimal satu tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda setelah data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, bebas multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sampel / Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup pegawai yang bekerja dalam OPD di Kabupaten Buru Selatan. Total responden sebanyak 100 orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses anggaran maupun pelaporan keuangan. Sampel ini dinilai representatif untuk menggambarkan kondisi kinerja birokrasi daerah dalam kaitannya dengan praktik akuntansi publik, tata kelola, dan pengawasan internal.

Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Temuan ini menggambarkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik dapat memperkuat tata kelola serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas instansi daerah. Selain itu, penelitian juga membuktikan bahwa penerapan prinsip good governance berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penerapan governance yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik terbukti mampu meningkatkan mutu layanan serta efektivitas pengelolaan pembangunan.

Sebaliknya, variabel pengawasan internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal di Kabupaten Buru Selatan belum berjalan optimal, sehingga belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh sejumlah permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, seperti ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan terhadap pajak kendaraan bermotor, serta sejumlah kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah.

Implikasi dan Manfaat

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas akuntansi sektor publik dan penerapan governance yang baik merupakan fondasi penting untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah. Perbaikan kebijakan, transparansi pelaporan keuangan, serta pengelolaan program pembangunan secara efektif dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian memberikan masukan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal agar mampu mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan pada regulasi, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan lebih efisien.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa akuntansi sektor publik serta prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Buru Selatan.

Kedua variabel tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pengawasan internal tidak menunjukkan dampak signifikan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penguatan sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kualitas tata kelola dan penyusunan program kerja serta memperbaiki mekanisme pengawasan demi tercapainya kinerja yang lebih optimal dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

C. JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal Internasional I

Judul Jurnal : *Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practice*

Nama Penulis : Mekar Meilisa Amalia

Tahun Terbit : 2023

Nama Jurnal : Es Akuntansi dan Keuangan

Vol dan Halaman : Vol. 1 No. 03, Hal. 160–168

ISSN Jurnal : 2985-7139

Tujuan

Penelitian ini disusun untuk meninjau berbagai literatur yang membahas praktik akuntansi sektor publik serta bagaimana praktik tersebut mampu mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Kajian ini mengupas bagaimana akuntansi publik menjadi alat yang tidak hanya mendukung pelaporan keuangan, tetapi juga berperan membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan tanggung jawab fiskal yang lebih baik.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan bibliometrik sebagai dasar analisis. Prosesnya meliputi pengumpulan data dari berbagai publikasi ilmiah, menyeleksi artikel yang relevan, melakukan ekstraksi informasi penting, kemudian menganalisis hubungan literatur menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Melalui metode ini, penulis dapat memvisualisasikan peta penelitian terkait akuntansi sektor publik, melihat pengaruh masing-masing publikasi, dan memahami struktur jaringan penelitian yang berkembang.

Konseptual

Data penelitian dihimpun dari sejumlah basis data akademik berstandar internasional seperti Web of Science, Scopus, dan Google Scholar. Ketiga platform tersebut dipilih karena menyediakan cakupan literatur yang luas dan kredibel. Untuk menjaga konsistensi analisis, penulis membatasi sumber pada publikasi berbahasa Inggris sehingga proses identifikasi, pengkodean, dan penarikan temuan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Hasil Penelitian

Hasil analisis menggunakan VOSviewer memberikan gambaran yang cukup mendalam mengenai perkembangan riset terkait akuntansi sektor publik dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Dari pemetaan tersebut, muncul beberapa klaster utama yang mencerminkan arah penelitian. Klaster pertama memperlihatkan fokus pada inovasi dan transparansi dalam praktik akuntansi pemerintah. Klaster kedua menyoroti reformasi akuntansi serta penerapan akuntansi berbasis akrual. Klaster ketiga mengangkat peran akuntansi forensik dan audit internal dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik. Klaster keempat menekankan isu efisiensi serta dukungan sistem informasi terhadap akuntansi sektor publik. Klaster kelima berfokus pada isu korupsi dan hubungan eratnya dengan audit sektor publik, sedangkan klaster terakhir menampilkan literatur terkait praktik akuntansi sektor swasta yang dinilai memiliki potensi kontribusi bagi pengembangan akuntansi publik. Dari analisis kata kunci, istilah “akuntan” menjadi kata yang paling sering muncul, menunjukkan kuatnya perhatian pada peran profesional akuntansi dalam mendorong transparansi. Sementara itu, kemunculan istilah “sistem informasi” yang lebih sedikit menunjukkan bahwa aspek teknologi masih relatif kurang digarap dalam riset terkait akuntansi publik.

Bagian Kesimpulan

Penelitian ini menyajikan pemetaan menyeluruh terhadap literatur mengenai akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Melalui analisis bibliometrik, penelitian berhasil mengidentifikasi karya-karya paling berpengaruh, pola kolaborasi antarpeleliti, serta tema-tema penelitian utama yang mendominasi bidang ini. Secara umum, kajian ini menegaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai klaster penelitian yang ditemukan memperlihatkan luasnya isu yang dikaji—mulai dari inovasi, reformasi akuntansi, audit internal, efisiensi, pengendalian korupsi, hingga potensi integrasi praktik akuntansi sektor swasta. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti maupun praktisi untuk memahami tren penelitian dan peluang pengembangan akuntansi sektor publik di masa mendatang.

Jurnal Internasional II

Identitas

Judul Jurnal : *A Thematic Literature Review on International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*

Nama Penulis : Sean Scannell & Vincent Tawiah

Tahun Terbit : 2024

Nama Jurnal : *Public Organization Review*

Vol dan Halaman : Vol. 24, Hal. 1053–1075

Tujuan

Artikel ini bertujuan merangkum dan menilai secara tematik perkembangan penelitian mengenai International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) selama periode 2000–2023. Penulis ingin memahami bagaimana standar ini diadopsi di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, serta meninjau manfaat, tantangan, dan konsekuensi penerapannya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan publik.

Dengan memetakan temuan dari beragam literatur, penelitian ini juga berupaya menunjukkan area yang masih jarang dieksplorasi dan layak diteliti lebih lanjut.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan *literature review* tematik, yang dilakukan melalui proses seleksi literatur dari database bereputasi seperti Web of Science dan Scopus. Penulis mengidentifikasi artikel yang relevan dengan topik IPSAS, termasuk aspek adopsi, pendorong dan hambatan, implikasi ekonomi, isu korupsi, serta penerapannya dalam konteks negara berkembang. Literatur yang dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, dianalisis secara komparatif, dan disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan riset IPSAS dalam dua dekade terakhir.

Konseptual

Secara konseptual, IPSAS lahir dari semangat *New Public Management* yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor publik. Standar ini dikembangkan oleh IPSASB untuk mendorong peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas menuju basis akrual yang dianggap mampu memberikan gambaran lebih utuh terkait aset, kewajiban, dan kondisi fiskal jangka panjang. Penulis meninjau berbagai pandangan teoretis seperti isomorfisme institusional—yang menjelaskan motif adopsi berdasarkan tekanan eksternal, kebutuhan legitimasi, dan pengaruh profesi—serta konteks budaya dan politik yang membentuk keberhasilan implementasi. Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa adopsi IPSAS bukan sekadar perubahan teknis, melainkan transformasi institusional yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil Penelitian

Kajian ini menemukan bahwa IPSAS memberikan sejumlah manfaat bagi negara yang mengadopsinya, terutama terkait peningkatan transparansi fiskal, kualitas pelaporan keuangan, serta akses pada pendanaan internasional. Literatur menunjukkan bahwa standar berbasis akrual mampu mengurangi asimetri informasi dan membantu pemerintah mengelola kewajiban jangka panjang secara lebih akurat. Namun, penulis juga mencatat

bahwa implementasi IPSAS tidak selalu menghasilkan dampak serupa di semua negara. Negara berkembang, misalnya, menghadapi kendala seperti keterbatasan teknologi, kurangnya SDM yang kompeten, serta minimnya pemahaman mengenai penggunaan informasi akrual dalam proses pengambilan keputusan.

Selain manfaat, kajian juga mengungkap tantangan yang cukup besar. Beberapa studi menyoroti bahwa IPSAS terlalu dipengaruhi oleh IFRS sehingga kurang sesuai dengan karakteristik sektor publik. Di negara tertentu, penerapan IPSAS justru bersifat seremonial tanpa benar-benar memengaruhi praktik pelaporan. Cash-basis IPSAS juga muncul sebagai solusi transisi, tetapi dinilai belum mampu memberikan gambaran keuangan yang lengkap. Oleh karena itu, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh dukungan politik, kesiapan institusional, budaya birokrasi, serta kapasitas sumber daya manusia.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa IPSAS memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pelaporan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila negara memiliki kesiapan institusional yang memadai, termasuk kemampuan teknis, dukungan politik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi keuangan yang akurat. Penulis menegaskan bahwa meskipun adopsi IPSAS meningkat di berbagai belahan dunia, standar ini tetap menghadapi tantangan substantif, terutama di negara berkembang yang masih berjuang dengan isu korupsi, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan regulasi. Kajian ini juga menyoroti pentingnya penelitian lanjutan mengenai aspek budaya, teknologi, dan keberlanjutan fiskal dalam konteks implementasi IPSAS.

D. CONTOH LAPORAN KEUANGAN

1. laporan Tarif Penyusutan

No.	Uraian	Masa Manfaat (th)	Batasan Kapitalisasi
1	Alat-Alat Besar Darat	10	10.000.000,00
2	Alat-Alat Besar Apung	10	10.000.000,00
3	Alat-alat Bantu	5	1.000.000,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	1.000.000,00
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10	300.000,00

2. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
I	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.628.519.929,00	2.589.093.034,00	98,50	1.771.165.308,00
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.834.846.122,00	1.831.261.000,00	99,80	1.277.303.500,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.483.972,00	182.072.940,00	99,77	169.752.176,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.535.000,00	128.950.000,00	90,47	207.590.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.930.000,00	76.470.000,00	96,88	12.890.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.600.000,00	52.100.000,00	95,42	0,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.395.265,00	111.526.800,00	96,65	91.249.200,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	4.834.473,00	3.217.957,00	66,56	1.882.077,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.615,00	30.642,00	88,52	14.558,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.962.276,00	188.383.386,00	96,13	0,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.568.888,00	3.770.112,00	67,70	2.620.947,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.329.318,00	11.310.197,00	84,85	7.862.850,00
II	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.797.307.618,00	3.682.966.072,00	96,99	2.031.155.281,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	3.063.400.010,00	2.977.255.748,00	97,19	626.120.570,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	625.559.128,00	605.115.164,00	96,73	1.405.034.711,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	108.348.480,00	100.595.160,00	92,84	0,00
III	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.850.000,00	25.610.000,00	77,96	259.057.500,00
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.490.000,00	24.250.000,00	77,01	1.245.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	257.812.500,00
	TOTAL	6.458.677.547,00	6.297.669.106,00	97,51	4.061.378.089,00

E. ANALISIS ARTIKEL, JURNAL NASIONAL & INTERNASIONAL, & LAPORAN KEUANGAN

Ketiga artikel yang disertakan dalam portofolio memberikan gambaran luas mengenai perkembangan akuntansi sektor publik di tingkat global. Artikel pertama dan kedua menunjukkan bahwa standar akuntansi publik terutama IPSAS dan basis akrual tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen reformasi tata kelola di berbagai negara. Review tersebut menegaskan bahwa implementasi IPSAS menghadapi tantangan berbeda antara negara maju dan berkembang, terutama terkait kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, serta kapasitas kelembagaan. Sementara itu, artikel ketiga memperluas fokus ke area Environmental Accounting (EA) yang menjadi tren global seiring tuntutan keberlanjutan dan pencapaian SDGs. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa topik EA di sektor publik masih berkembang, namun mulai menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu lingkungan sebagai bagian dari akuntabilitas fiskal pemerintah. Secara keseluruhan, ketiga artikel memperlihatkan bahwa standar pelaporan publik terus berevolusi ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan secara sosial.

Ketiga jurnal nasional menyoroti bagaimana konsep akuntansi sektor publik diterapkan dalam konteks Indonesia. Jurnal pertama menegaskan bahwa implementasi SAP berbasis akrual mampu meningkatkan mutu pelaporan, meskipun tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan simpang-siur regulasi masih menghambat efektivitasnya. Jurnal kedua mengungkap bahwa praktik akuntansi akrual telah menghasilkan kemajuan nyata—dibuktikan dengan meningkatnya opini WTP—namun ketimpangan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas pelaporan tidak merata. Jurnal ketiga secara empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik dan prinsip good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan pengawasan internal belum optimal. Dibandingkan artikel internasional, jurnal nasional memberi gambaran lebih realistis mengenai kondisi lapangan di Indonesia: tantangan implementasi sering kali tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan dan budaya organisasional.

Jurnal internasional dalam portofolio memperkuat perspektif global mengenai bagaimana akuntansi sektor publik dipandang sebagai pilar utama transparansi fiskal. Jurnal pertama melakukan analisis bibliometrik yang mengungkap bahwa fokus penelitian internasional banyak terkait inovasi akuntansi publik, reformasi akrual, audit internal, efisiensi, serta isu korupsi. Sementara itu, jurnal kedua memberikan kajian tematik komprehensif mengenai IPSAS, menunjukkan bahwa standar ini bisa

memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelaporan, namun adopsinya sangat dipengaruhi faktor politik, sosial, dan kelembagaan. Ketika dibandingkan dengan jurnal nasional, perbedaannya terlihat jelas: riset internasional lebih banyak menyoroti *big picture* dan model ideal implementasi, sedangkan riset nasional menyoroti tantangan operasional yang konkret. Integrasi antara keduanya menunjukkan bahwa reformasi akuntansi publik tidak dapat mengandalkan perubahan teknis semata, tetapi juga membutuhkan komitmen politik, budaya birokrasi yang mendukung, serta penguatan kapasitas institusi.

Laporan keuangan yang ada dalam portofolio—yaitu tarif penyusutan dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)—menjadi bukti praktik nyata penerapan prinsip akuntansi sektor publik. Tarif penyusutan mencerminkan prinsip dasar akuntansi akrual, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengakui pengeluaran saat kas keluar, tetapi juga mencatat penurunan nilai aset secara sistematis. Hal ini selaras dengan tuntutan SAP dan IPSAS untuk mengukur aset secara lebih akurat. Sementara itu, LRA menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola anggaran berdasarkan pendapatan dan belanja aktual yang terjadi. Secara analitis, kedua laporan tersebut membuktikan bagaimana teori dalam artikel dan jurnal di atas diterapkan dalam praktik: pemerintah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang lengkap, andal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika dibandingkan dengan temuan artikel dan jurnal, laporan ini menunjukkan bahwa meskipun standar telah diterapkan, kualitas keluaran (output laporan keuangan) sangat ditentukan oleh kapasitas SDM, kualitas sistem informasi, serta komitmen terhadap tata kelola.